



Polemik Peranan Bin (Badan Intelijen Negara) dalam Menangani Pandemi Covid-19

Puji Sari Mardalena¹, Gili Argenti², Moch. Faizal Rizki³

¹Mahasiswa Universitas Singaperbangsa Karawang

^{2,3}Dosen Universitas Singaperbangsa Karawang

Email pujisarimardalena@gmail.com, HP. 085711440126

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima: 7 Maret 2022

Direvisi: 11 Maret 2022

Dipublikasikan: Maret 2022

e-ISSN: 2089-5364

p-ISSN: 2622-8327

DOI: 10.5281/zenodo.6358161

Abstract:

The State Intelligence Agency (BIN) as one of the organizers of public safety is considered not to have the power to be involved in handling the Covid-19 pandemic. The various exercises carried out are considered to have the potential to abuse their authority and are counter-beneficial for inter-agency cooperation in limiting the spread of Covid-19. Through an illustrative subjective methodology, this exploration will describe the oddities through disclosing and describing accounts of suspicious information and exercises carried out by BIN in dealing with Covid-19. Given the four main components provided by Law no. 17/2011, in particular (1) the existence of insight data; (2) important investigations; (3) the existence of an expected hazard; and (4) there is a shield against the public interest and security, the assumption that BIN's contribution will be dissected and thoroughly examined. The consequence of this research shows that there are complexities and changes in hazards that place more emphasis on human security, thus enabling BIN to control the dangers that interfere with the welfare of citizens.

Keywords: *State Intelligence Agency, Covid-19, National Security*

PENDAHULUAN

Kemajuan dalam inovasi dan deregulasi akibat globalisasi, telah memperluas keragaman individu, modal, tenaga kerja dan produk, sehingga selain memberikan berbagai keuntungan, juga menimbulkan berbagai kelemahan. Center for the Analysis of Health Determinants (2019) menegaskan hal ini dengan mengatakan bahwa peningkatan

keseimbangan individu dan produk dapat membuat penularan penyakit baru atau lama muncul kembali dengan penyebaran yang lebih cepat dan menyebabkan krisis kesehatan umum.

Memang, berbagai episode penyakit yang tak tertahankan telah berubah menjadi bahaya nyata yang telah berkembang menjadi bahaya kesehatan dunia. Sejak

merebaknya Sindrom Pernafasan Akut Parah (SARS) di wilayah Asia pada tahun 2003, risiko episode penyakit yang tak tertahankan telah meningkat secara umum, sebagaimana dikonfirmasi oleh wabah flu burung (H5N1) pada tahun 2004, flu babi /flu babi (H1N1) tahun 2009, Middle East Respiratory Syndrome-Corona Virus (MERS-CoV) tahun 2012, Ebola tahun 2014, dan Zika tahun 2015 (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2018).

Kondisi medis umum yang nyata ditunjukkan oleh merebaknya pandemi Covid-19 baru SARS-CoV-2 (Covid-19), yang dimulai dari Wuhan China pada Desember 2019 dan menyebar ke seluruh dunia. Tingginya penyebaran infeksi membuat Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengumumkan krisis kesejahteraan di seluruh dunia pada 30 Januari 2020 (Velavan dan Meyer, 2020) dan membengkak menjadi pandemi di seluruh dunia pada 11 Maret 2020 (Cucinotta dan Vanelli, 2020). Status krisis langsung dengan informasi kasus Covid-19, yang per 12 Juni 2021 telah menginfeksi 174.918.667 pasien, termasuk 3.782.490 kematian di seluruh dunia (WHO, 2021). Di Indonesia, per 13 Juni 2021, informasi dari Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN, 2021) menyebutkan ada 1.911.358 pasien positif terkonfirmasi dengan korban jiwa habis-habisan sebanyak 52.879 orang sejak Covid-Pencemaran 19 pertama kali diselidiki pada 2 Maret 2020. Dalam kurun waktu tersebut, berbagai pengaturan telah dilakukan pemerintah, mulai dari Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), hingga Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk wilayah Jawa-Bali.

Alasan utama dari pedoman ini adalah sebagai syafaat untuk kerangka kesejahteraan untuk membatasi perkembangan individu untuk membatasi penularan Covid-19. Selain itu, otoritas publik juga telah membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 (Keppres No. 7/2020) yang kemudian diperbarui

menjadi Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN). yang pada dasarnya adalah mensinergikan seluruh komponen otoritas publik dari berbagai daerah yang terkena dampak. , baik di bidang kesejahteraan umum maupun bidang yang berbeda, misalnya sosial, politik, keuangan yang mengarah pada bagian dari keselamatan umum (Djoyonegoro, 2020).

Menyinggung kualitas penularan Covid-19 yang sangat mudah menyebar melalui kontak manusia, upaya mengikuti dan pengintaian adalah salah satu langkah ampuh dalam menahan penyebaran infeksi secara lokal. Dalam kebutuhan ini, kerja wawasan menjadi sangat penting, karena dapat mengikuti dan mengenali kemungkinan penyebaran setiap kelompok baru (Bahtiar dan Munandar, 2020). Kapasitas tersebut sudah dimanfaatkan Presiden Jokowi sejak ditemukannya kasus primer Covid-19 di Indonesia pada 2 Maret 2020, dengan meminta komponen ilmu pengetahuan, baik dari Badan Intelijen Negara (BIN) maupun Polri untuk menyelesaikannya menyusul upaya penanganan terduga Covid-19. -19 (Fahreza, 2020). Selain tidak adanya staf kesejahteraan untuk melakukan kapasitas ini, otoritas publik percaya bahwa wawasan dapat bekerja dengan tenang tanpa menyambut hiruk-pikuk publik yang dapat berdampak lebih besar. Selama ini, BIN secara efektif terkait dengan menyelesaikan berbagai latihan untuk membatasi penyebaran Covid-19, misalnya, swab massal, penyemprotan disinfektan untuk mengeksplorasi obat-obatan dan imunisasi. (Tim VELOX, 2020c, 2020a, 2020b).

Penyelesaian massal dan, yang mengejutkan, swab besar-besaran dilakukan di ruang publik yang berbeda seperti stasiun Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta, terminal/pelabuhan udara, pertokoan, dan yayasan pendidikan (Laeis, 2020; Sulistyawati, 2020). Kontainer juga turut ambil bagian dalam melayani permintaan administrasi swab di Kementerian Negara/Lembaga, DPRD

setempat dan swasta, yang menjelang awal pandemi, aksesibilitas administrasi tersebut masih sangat terbatas (Kurniawan, 2020; Biru, 2020; Pemkab Karawang, 2020). Perangkat keras uji Covid-19 yang digunakan oleh BIN juga dianggap sangat kompleks pada saat itu, seperti uji portabel polymerase chain response (PCR) yang dijamin secara universal dan Helm Termal KC Wearable yang dapat mengidentifikasi tingkat panas internal seseorang di dalam 10 meter (Nugraha, 2020; Rochman, 2020). Receptacle bahkan telah menyiapkan perangkat kerasnya dengan membangun lab tetap dengan norma BSL-2+ dan empat unit pusat penelitian portabel dengan norma BSL-2 untuk membantu memperluas pengujian dalam mencapai zona merah berbeda yang sebelumnya jauh dari layanan penting. Selain itu, tugas pembinaan dan pemberdayaan daerah juga dilakukan BIN pada berbagai acara, seperti pendidikan dan peningkatan kesejahteraan di Kampus Universitas Djuanda Bogor (Humas Unida, 2020), SMAN 7 Tangerang Selatan (Deniansyah, 2020) dan Jawa Tengah. Masjid Agung Semarang (Ariwibowo, 2020).

Meskipun demikian, tindakan pengetahuan ini dianggap oleh kelompok yang berbeda sebagai penganiayaan kekerasan atau penganiayaan kekuatan. Canister seharusnya hanya berperan sebagai pengirim data mengingat penemuan awal dan penghindaran awal, bukan sebagai pelaksana pendekatan. Hal ini diungkap Feri Kusuma dari Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) yang mengatakan asosiasi BIN mungkin bisa membuat organisasi pengetahuan menyelesaikan tugas di luar posisinya sebagai kumpulan data wawasan terkait Covid-19 episode ke Presiden (Wardah, 2020). Apalagi, di antara berbagai latihan yang dilakukan BIN, upaya bersama dalam eksplorasi dan produksi obat Covid-19 dengan TNIAD dan Universitas Airlangga (Unair) menjadi perbincangan yang paling kentara. Kontribusi BIN di bidang kesejahteraan

umum dan anggapan bahwa episode pandemi Covid-19 dalam domain keselamatan publik juga dipandang sebagai kecurigaan yang salah, terutama dengan asumsi BIN tertarik pada penelitian produksi obat dengan berbagai laboratorium dan instruktif. organisasi (Prabowo, 2020). Dengan alasan berbeda tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang dimotori oleh Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Indonesia Corruption Watch (ICW) bahkan memberikan keterangan resmi. , yang salah satunya mendorong Presiden RI untuk tidak memasukkan pengetahuan dalam menangani secara langsung terkait dengan pengintaian kesejahteraan umum yang dipandang bukan ranah kemampuan dan kewenangan jabatan (Kontras, 2020).

Mencermati dua cerita yang saling berbenturan itu, maka penting untuk membedah anggapan dan asal usul ilmu yang menjadi alasan meletakkan pengaruh BIN dalam menangani Covid-19 di Indonesia. Terlepas dari kenyataan bahwa sampai saat ini belum diamati asal mula wawasan yang tunggal, beberapa referensi utama secara teratur menyinggung definisi yang dikomunikasikan oleh Kent (1949) yang menyatakan bahwa pengetahuan akan menjadi informasi yang harus dipindahkan oleh negara untuk disimpan. dengan bantuan sosial pemerintah. Selain itu, definisi Kirkpatrick (1997) juga menyatakan bahwa wawasan adalah informasi yang dicari oleh negara dalam menjawab bahaya luar dan untuk menjaga keuntungan esensial mereka, terutama untuk bantuan pemerintah dari kerabat mereka sendiri. Central Intelligence Agency (CIA (1999) menyatakan bahwa informasi ini diperlukan sebagai pengantar untuk pilihan dan kegiatan pembuat strategi, untuk situasi ini Presiden. Mencermati definisi tersebut, tidak kurang dari empat komponen utama yang mendasari definisi dan gagasan wawasan, untuk lebih spesifik (1) adanya data atau

informasi; (2) penyelidikan vital; (3) kemungkinan bahaya; dan (4) upaya melindungi kepentingan dan keamanan publik yang diambil dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, sebagai berikut :

“Intelijen Negara berperan melakukan upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan untuk deteksi dini dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan terhadap setiap hakikat ancaman yang mungkin timbul dan mengancam kepentingan dan keamanan nasional.”

Mencermati empat komponen fundamental dalam tugas wawasan, penelitian ini bermaksud untuk melihat kekuatan BIN dalam menangani Covid-19 di Indonesia. Melalui metodologi subyektif ekspresif, pemeriksaan ini akan menguraikan keganjilan melalui pengungkapan dan penggambaran informasi secara akuntabel (Anggito dan Setiawan, 2018) atas praduga dan latihan yang dilakukan BIN dalam menangani Covid-19. Selain itu, sebagaimana ditunjukkan oleh tahapan pemeriksaan informasi dari Miles dan Huberman (1994), informasi seperti foto, rekaman, arsip berita dan laporan otoritas lainnya akan dikumpulkan, dikurangi, diperkenalkan dan diakhiri untuk menjawab tujuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Informasi Intelijen

Wawasan pada dasarnya memiliki sifat yang khas sebagai pencari data. Pedrason (2012) menetapkan bahwa pengetahuan dalam iklim penting mendorong titik fokus dari berbagai data yang berasal dari sumber yang berbeda, baik terbuka maupun tertutup. Selain itu, Saronto (2020) juga mengusulkan definisi yang sebanding, menjadi pengetahuan khusus adalah metode yang terlibat untuk mendapatkan semua yang ingin Anda ketahui sebelum menjalankan bisnis, sebagai informasi pengantar dalam menyusun rencana kerja. Mengingat hal ini,

data adalah bisnis utama yang memiliki bagian penting dari siklus pengetahuan.

Perbedaan mendasar antara data wawasan dan data pakar lainnya adalah kepuasan komponen (siapa), (apa), (mengapa), (di mana), (kapan), dan (bagaimana). Enam komponen, yang biasa disebut 5W+1H, adalah kunci fundamental untuk mensurvei legitimasi data pengetahuan.

Kebutuhan data pengetahuan berubah menjadi kebutuhan wawasan sebagai alasan proses proposisi pendekatan bagi para pemimpin, baik kunci maupun strategis. Kehadiran pandemi Covid-19 yang sangat unik ini membuat perkembangan intimidasi ini harus diwaspadai secara tepat dan menyeluruh. Aksesibilitas tempat tidur klinik darurat, obat-obatan, Alat Pelindung Diri (APD), ventilator, dan, yang mengejutkan, keadaan keuangan daerah adalah data penting yang harus diketahui Presiden sebelum melakukan pendekatan. Berbagai kebijakan yang bersifat intervensi kontak fisik diyakini juga merupakan suatu proses penentuan dari berbagai pilihan kebijakan yang cukup sulit, agar tidak menimbulkan dampak turunan yang lebih buruk (Samudro & Madjid, 2020).

Sementara itu, cara mendapatkan informasi intelijen juga menjadi satu disiplin ilmu dalam teori intelijen. Das (2008) membagi lima instrument utama yang dilakukan oleh intelijen dalam memperoleh informasi, yakni

- (1) *Human Intelligence* (HUMINT), merupakan pengumpulan informasi melalui kontak manusia, biasanya mencakup informasi mengenai nama target, lokasi, waktu, pergerakan serta niat dari target;
- (2) *Signal Intelligence* (SIGINT), merupakan pengumpulan informasi dari pencegatan (intersepsi) emisi elektromagnetik, biasanya dari komunikasi elektronik;
- (3) *Imagery Intelligence* (IMINT), merupakan pengumpulan

informasi yang bersumber dari pencitraan udara terhadap suatu target sasaran. Sumber informasinya biasanya berdasar infrared, radar, Moving Target Indicator (MTI), serta Laser Radar (LADAR);

- (4) *Measurement and Signature Intelligence* (MASINT), merupakan pengumpulan informasi yang menggabungkan data dari SIGINT dan IMINT untuk menganalisa data dari berbagai spektrum ancaman elektromagnetik. Turunan dari instrument ini mencakup berbagai analisa seperti *Nuclear Intelligence* (NUCINT) untuk mendeteksi peralatan nuklir dan *Chemical and Biological Intelligence* (CBINT) untuk mendeteksi residu biokimia; serta
- (5) *Open Source Intelligence* (OSINT) yang merupakan pengumpulan informasi berbasis data yang tersedia secara terbuka di berbagai media, seperti radio, televisi, surat kabar, internet, database komersial, video, gambar dan berbagai sosial media.

Berdasarkan berbagai instrument tersebut, intelijen mempunyai beragam pendekatan dalam pengumpulan informasi dalam keikutsertaannya pada penanganan Covid-19. Perintah Presiden kepada BIN untuk melakukan tracking dan tracing terhadap pasien Covid-19 merupakan salah satu implementasi instrument HUMINT yang sangat dibutuhkan untuk meminimalisir penularan di tengah masyarakat. Lokasi, waktu dan kontak target menjadi informasi berharga yang harus dikumpulkan oleh intelijen untuk dapat memetakan kemungkinan sebaran klaster yang mungkin terjadi. Selain HUMINT, *tracing* dan *surveillance* kesehatan tersebut juga dapat menggunakan instrument lainnya seperti SIGINT untuk menentukan lokasi target

melalui pelacakan digital berbasis *mobile phone*, atau OSINT berbasis data perjalanan pasien.

Cara - cara tersebut setidaknya telah dilakukan oleh badan intelijen Israel, *Military Intelligence Directorate* (MID) untuk menemukan lokasi individu yang terkonfirmasi positif Covid-19, beserta seluruh perjalanan dan kontakannya dengan orang lain (Kahana, 2020).

Analisa Strategi Intelijen

Setelah tahap pengumpulan data, pengetahuan diharapkan dapat membuat pemeriksaan penting dari suatu masalah. Di antara beberapa hasil pengetahuan yang signifikan adalah penilaian, pengukuran, peringatan dini, dan pemikiran kritis. Sugirman (2009) menyatakan bahwa kualitas penyelidikan pengetahuan adalah ketepatan dalam memberikan penilaian, ketajaman dan ketepatan dalam mengusulkan penentuan, dan proporsionalitas dalam merencanakan peringatan dini. Judgment itu sendiri dicirikan sebagai evaluasi terhadap suatu kasus atau keadaan tertentu melalui pemberian kepentingan dan pemberian makna. Melalui penilaian, suatu kasus akan disurvei sebagai alasan untuk pemeriksaan selanjutnya, sehingga ketepatan dalam mengambil keputusan sangat penting dengan tujuan agar wawasan yang tepat dalam memberikan peringatan dini atau pemikiran kritis terhadap suatu masalah. Selain itu, setelah membuat keputusan, pengetahuan juga harus memiliki pilihan untuk membuat dugaan.

Hyndman dan Athanasopoulos (2018) mencirikan antisipasi sebagai "harapan yang paling dapat diandalkan untuk hal-hal yang akan datang, dengan mempertimbangkan semua data yang sesuai, termasuk informasi otentik dan data tentang kemungkinan kejadian di masa depan yang memengaruhi suatu masalah." Melalui definisi ini, perkiraan wawasan dapat diartikan sebagai cara berpikir dalam memberikan bayangan dan gambaran kemajuan keadaan yang mungkin terjadi, sebagai ciri dari berkurangnya kerentanan

di kemudian hari, sehingga pembuat strategi dapat lebih menentukan pilihan tanpa masalah.

Selain itu, fase utama dari pemeriksaan prosedur pengetahuan adalah peringatan dini, khususnya memberikan gambaran keadaan sehubungan dengan konsekuensi dari efek, bahaya dan risiko yang mungkin muncul dari sini, mengingat masalah bukti yang dapat dikenali, penilaian dan perkiraan. Dalam memahami keadaan episode pandemi Covid-19, demonstrasi yang menghasilkan ekspektasi penyebaran dan kemungkinan penyelesaian pandemi adalah salah satu kunci pengobatan Covid-19 yang efektif (Bertozzi et al., 2020).

Ketertarikan Canister dalam merencanakan penayangan dan harapan Covid-19 (Astuti, 2020), merupakan jenis penentuan yang menggambarkan ujian penting administrasi pengetahuan. Meskipun tidak selalu benar, penentuan juga merupakan salah satu hal penting dalam pemberitahuan awal atau peringatan dini untuk pengenalan kemungkinan bahaya baru atau peningkatan bahaya. Beberapa lansiran awal dari BIN yang sempat mengemuka di masyarakat antara lain bagian infeksi Corona baru variasi B117 dari Inggris (Priyasmoro, 2021) dan perkiraan lonjakan penyakit setelah Idul Fitri (Laelani, 2020). Lebih lanjut, secara administratif, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara telah mengendalikan motivasi di balik pembentukan organisasi tersebut, khususnya untuk memberikan peringatan dini untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan bahaya bagi keselamatan publik.

Menyinggung premis ini, jelas pengetahuan negara harus dikaitkan secara efektif dengan penanganan Covid-19 dan bahaya kesejahteraan umum lainnya, baik yang berpotensi maupun yang bersifat asli untuk kepentingan dan keamanan publik. Selain itu, sesuai Pasal 4 UU 17/2011 tentang Intelijen Negara, segala upaya lokasi dan peringatan dini diarahkan pada

pengecanaan, pemeriksaan dan pemukulan terhadap segala bentuk bahaya. Dengan cara ini, meskipun secara keseluruhan tugas wawasan negara hanya dalam dua hal, yaitu identifikasi awal yang spesifik dan peringatan dini, keduanya dapat diterapkan untuk alasan yang lebih luas, khususnya untuk mencegah, memeriksa, dan menaklukkan segala potensi bahaya. Khususnya mengenai bahaya penyakit yang tidak dapat dicegah, misalnya Covid-19 yang telah menimbulkan status krisis publik (Pratiwi dkk., 2020), wawasan sebagai salah satu penghibur keselamatan publik memegang peran dan kewajiban prinsip dalam menghambat dan menghentikan kegiatan tersebut penyebaran Covid-19 dengan segala kapasitas dan batasannya (Atam et al., 2020).

Potensi Ancaman

Dalam ranah wawasan, (bahaya) menjadi jiwa yang menjadi alasan untuk bertindak dalam suatu gerakan atau aktivitas pengetahuan. Sukarno (2014) menyatakan bahwa bahaya adalah suatu hal, kondisi, kejadian atau kegiatan yang berbahaya, menyusahkan, mengganggu, sulit dan merusak. Berkaitan dengan asal usul umum, bahaya adalah ikhtiar baik dari dalam maupun luar negeri yang dapat membahayakan kesejahteraan negara, keamanan, kekuasaan, kepercayaan, dan kepentingan umum dalam berbagai sudut pandang, baik filosofis, politik, finansial, sosial-sosial, dan lain-lain. serta perlindungan dan keamanan. Menurut perspektif jangkauan, bahaya dibagi menjadi dua, khusus adat dan modern atau dalam definisi lain disebut biasa dan tidak teratur (Sagena, 2013).

Pada tingkat konvensional, bahaya adalah nyata yang harus terlihat dengan mata telanjang, seperti pemberontakan yang dilengkapi, penindasan psikologis, pelanggaran laut, pelanggaran regional, serangan dan gangguan. Untuk sementara, bahaya non-reguler tidak terlihat, seperti darurat keuangan, kekotoran, kerusakan, publisitas, pakaian digital dan uang tunai. Dengan berakhirnya perang virus,

jangkauan bahaya kini lebih diliputi oleh bahaya kontemporer (Non-Traditional Threats), yang sebagian besar ditentukan oleh kemajuan isu-isu vital seperti demokratisasi, pelaksanaan kebebasan bersama dan penindasan psikologis (A'raf, 2015).

Kondisi ini juga telah menggeser kerangka keselamatan publik yang semula terpaku pada (state focus security) menjadi human-focused (individual focus security) atau dalam definisi lain disebut human security atau human security. Melalui gagasan human security, hazard to human security center di sekitar tujuh wilayah keamanan, lebih spesifiknya: ketahanan moneter, ketahanan pangan, keamanan kesejahteraan, keamanan alam, keamanan individu, keamanan wilayah lokal dan keamanan politik (Subiyanto, 2018; UNDP, 1994). Berangkat dari pemikiran ini, maka kepuasan masuknya semua aspek dalam keamanan manusia secara konsekuen berubah menjadi kepentingan umum suatu bangsa, sehingga bahaya yang menghambat siklus tersebut berubah menjadi bahaya publik yang harus disingkirkan.

Urutan bahaya juga merupakan salah satu komponen dalam inti bahaya yang penting untuk perenungan pandangan terang. Sukarno (2014) juga mengurutkan bahaya tersebut menjadi empat tingkatan, yaitu bahaya khusus dalam skala kecil (kecil), sedang (sedang), asli (besar) dan dasar (sangat besar). Urutan bahaya tersebut penting sebagai tolak ukur kegiatan wawasan, sehingga kegiatan pengetahuan dapat diperkirakan, berhasil dan tidak melimpah yang dapat menimbulkan akibat buruk lainnya. Signifikansi tatanan ini mendorong Kuncoro (2019) untuk mengungkapkan bahwa blunder dalam penilaian suatu bahaya merupakan tahap awal dari penyimpangan kekuasaan oleh pengetahuan negara.

Terkait dengan pandemi Covid-19, Nurhasanah, Napang, dan Rohman (2020) jelas menyatakan bahwa gejala tersebut dapat dikatakan sebagai bahaya modern

karena tidak secara eksplisit menargetkan aset militer. Selain itu, Albert, Baez, dan Rutland (2021) juga menyatakan bahwa Covid-19 merupakan bahaya bagi keamanan dunia karena efeknya yang sangat besar terhadap keamanan individu (human security) dan secara langsung telah mengganggu kemampuan masyarakat untuk menjaga keamanan pribadi yang layak dan aman. Kepuasan, khususnya dalam ruang jaminan kesehatan dan keamanan finansial.

Sesuai dengan tugas yang diberikan oleh UU 17/2011 untuk menyatakan wawasan sebagai garis utama dalam kerangka keselamatan publik, kepuasan kesejahteraan negara dan keamanan penduduk juga merupakan hal utama yang harus digunakan sebagai aturan untuk aktivitas dan pembatasan aktivitas. Kekuatan pengetahuan negara. Oleh karena itu, adanya ancaman terhadap upaya melindungi penghuni dari kesejahteraan dan ketidakmampuan perkantoran harus menjadi salah satu jaminan keamanan yang penting bagi ranah kerja wawasan (Hartati, 2020). Kemudian Lippi, Sanchis-Gomar, dan Henry (2020) mengatakan bahwa Covid-19 adalah senjata alami terbaik mutlak dalam periode klinis mutakhir, meskipun tidak ada bukti logis bahwa senjata organik itu sengaja dibuat. Untuk alasan tertentu. Meskipun demikian, mengingat jumlah korban yang sangat besar dan keuntungan finansial untuk pertemuan tertentu, Dehghani dan Masoumi (2020) masih membuka peluang demonstrasi sadar dalam pengembangan Covid-19 sebagai senjata organik. Melihat hal tersebut, peluang munculnya ide bahaya dalam merebaknya Covid-19 membuat episode tersebut menjadi kelas dasar.

Intinya Hidayat (2019) mengungkapkan bahwa bahaya senjata organik bersifat massal dan terkait dengan berbagai bidang kehidupan. Armawi dan Suhendar, (2010) juga mengungkapkan bahwa efek senjata organik lebih berbahaya daripada bahaya penindas berbasis ketakutan biasa karena korbannya akan

lebih beragam, lebih luas dan lebih lama. Tingginya karakterisasi bahaya terhadap senjata organik (serta atom dan zat) menjadikan pengetahuan negara untuk menempatkan bermacam-macam dan menyelidiki data tersebut sebagai kebutuhan yang paling penting (Wirtz, 2013). Sejalan dengan itu, penyertaan wawasan negara dalam penanganan pandemi Covid-19 ditegaskan tidak hanya dalam batas pasien yang sembuh (remedial), tetapi juga dalam identifikasi dini dan antisipasi kemungkinan bahaya lanjutan yang menyertai pandemi, salah satunya. yang merupakan peluang untuk melibatkan infeksi sebagai sumber kontaminasi senjata pemusnah massal.

Kepentingan dan Keamanan Nasional

Kepentingan umum adalah tujuan (objectives) yang ingin dicapai oleh para pemimpin di tingkat publik. Krasner (1978) merujuk bahwa ada dua cara untuk membedah makna kepentingan publik. Pertama, metodologi logis yang koheren, yang merupakan definisi yang menerima bahwa negara pada umumnya mengejar tujuan-tujuan utama sesuai dengan kejujuran regional dan politik. Melalui metodologi ini, makna keselamatan publik tidak dapat dibedakan dengan negara yang sedang dirusak dengan kepercayaan politik atau keaslian regionalnya. Sementara itu, bagi negara-negara yang saat ini dilindungi, pendekatan ini tidak dapat menjelaskan isu-isu strategi publik, seperti ekonomi dan hubungan asing.

Kedua, metodologi observasional-induktif sebagai pilihan dalam mencatat masalah utama. Dalam metodologi ini, kepentingan umum diambil dari pernyataan dan perilaku kepala-kepala masyarakat dalam hal bertemu dengan dua keadaan, khususnya tidak dalam kepentingan individu dan perkumpulan-perkumpulan tertentu, terlepas dari tetap berpegang pada kebutuhan tujuan publik. Melalui metodologi ini, keselamatan publik akan berubah menjadi ide yang unik karena tujuan publik sering diubah oleh unsur-unsur bahaya di suatu negara. Untuk

sementara, makna keselamatan publik selalu dikaitkan dengan gagasan kemerdekaan dari bahaya fisik atau militer ke suatu negara. Akhgar, Yates, dan Lockley (2013) juga memperhatikan bahwa arti keseluruhan dari keselamatan publik umumnya berpusat di sekitar menjaga otoritas publik atau negara untuk penduduk terhadap berbagai bahaya dan ancaman.

Definisi tersebut juga selaras dengan yang dikemukakan oleh Barry Buzan, sebagai berikut.

“Security is taken to be about the pursuit of freedom from threat and the ability of states and societies to maintain their independent identity and their functional integrity against forces of change, which they see as hostile. The bottom line of security is survival, but it also reasonably includes a substantial range of concerns about the conditions of existence” (Buzan, 1991).

Mengingat definisi dan gagasan keselamatan publik di atas, semua hal dipertimbangkan, dianggap sebagai kondisi yang dilindungi dengan praktis tidak ada risiko atau bahaya, meskipun dengan dan dengan kondisi ini mungkin tidak langsung. Relativitas keadaan ini, oleh Manunta (2000) dikatakan bergantung pada tiga faktor utama, yaitu sumber daya spesifik yang diamankan, pembela yang berperan dalam menjaga sumber daya, dan bahaya terhadap sumber daya. Menyinggung Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, ilmu pengetahuan berjalan sebagai garda utama (*first line of protection*) keamanan masyarakat (UU Intelijen Negara, Pasal 3), sehingga tugasnya sangat krusial dalam mendapatkan sumber daya, baik di tingkat negara bagian maupun individu warga (Mengko, 2017). Secara menyeluruh, Lowenthal (2009) menjelaskan tiga tujuan di balik mengerikannya wawasan dalam keselamatan publik. Pertama-tama, wawasan diharapkan terhindar dari keheranan utama mengingat karya ilmiah yang diandalkan memiliki kemampuan untuk mengenali segala bahaya yang

mungkin dapat mengancam keberadaan negara. Kedua, pengetahuan diharapkan dapat membantu proses pendekatan publik. Dalam pekerjaan ini, pengetahuan diharapkan dapat memberikan laporan yang cepat dan tepat (*velox et exactus*) sehubungan dengan fondasi, pengaturan, data, peringatan bahaya dan manfaat dan kerugian dari suatu pendekatan. Dengan pekerjaan ini, strategi publik yang diambil dapat lebih cakap dan layak untuk kemajuan negara dan masyarakat.

Ketiga, pengetahuan diharapkan dapat menjaga kerahasiaan data publik, sehingga cara mendapatkan, mengamankan, dan menyebarluaskan data tersebut juga harus dilakukan secara rahasia dengan wawasan. Di tengah uniknya bahaya Covid-19, tugas pengetahuan negara dalam mengakui (kesiapan) dalam mengelola unsur-unsur peningkatan *flare-up* sangat penting. Kemajuan iklim esensial sebagai variasi baru atau status antibodi, misalnya, merupakan data yang sangat dibutuhkan, baik untuk menghindari keheranan utama maupun dalam mendukung pengaturan publik untuk mengelola Covid-19. Kini, rangkaian latihan yang dilakukan BIN dalam kemampuan dan kapasitasnya sebagai ciri penanganan pandemi Covid-19, menjadi sangat esensial dalam kerangka keselamatan publik. Selain itu, informasi tentang Covid-19 masih sangat terbatas di awal pandemi (Alfirdaus dan Yuwono, 2020), sehingga diperlukan kapasitas pengetahuan di bidang sosial data yang signifikan, baik di dalam maupun di luar negeri.

Bagaimanapun, dalam menyelidiki kekuatan BIN dalam struktur keselamatan publik yang terdiri dari mitra yang berbeda, metodologi kooperatif diharapkan untuk menghubungkan batas dan kemungkinan persilangan antara pertemuan yang berbeda ini. Dalam penanganan Covid-19, yang berawal dari bahaya hingga kesejahteraan umum dan menyebar ke berbagai wilayah, penting untuk membagi aset di antara komponen yang berbeda, agar kapasitas

dan spesialis masing-masing dapat bersinergi menuju tujuan yang sama. Latihan kontainer secara bebas dalam penanganan Covid-19 yang berbeda dengan latihan seperti swab massal, penyemprotan cairan pembersih untuk pemeriksaan obat dan antibodi dapat mengganggu kerja sama ini. Perbedaan pendekatan antara wawasan yang tertutup (*incognito*) dan administrasi kesejahteraan umum yang terbuka (*obvious*), menjadi isu penting dalam menilai pembatasan pengaruh BIN dalam menangani Covid-19. Sesuai dengan bisnis pusatnya, BIN dapat membantu penanganan Covid-19 dengan mengikuti pedoman administrasi kesejahteraan umum, baik pemerintah maupun swasta, sehingga potensi kekerasan atau penyelewengan dari K/L yang berbeda dapat dihindarkan.

KESIMPULAN

Pada dasarnya, kontra-akun yang berbeda terhadap penyertaan BIN dalam menangani pandemi Covid-19 dibawa ke dunia dalam sistem kekhawatiran tentang potensi penganiayaan kekuatan dari BIN, yang dianggap tidak tepat sasaran. Untuk pertemuan-pertemuan tertentu, kantor wawasan dianggap sebagai bagian dari kekuasaan negara yang kemampuannya menyebarkan bahaya bagi kesejahteraan negara, seperti permusuhan, penyerangan, pengintaian, atau pembangkangan yang dilakukan.

Sejujurnya, setelah perang virus dan meluasnya isu-isu bermanfaat, pentingnya keselamatan telah berpindah, dari gagasan keamanan yang berfokus pada negara seperti yang baru-baru ini dirujuk, ke keamanan yang berfokus pada individu (*individual focus security*). Melalui pergeseran teoretis ini, para penghibur keselamatan publik, termasuk BIN, harus benar-benar terlibat dalam menjaga pemenuhan kebebasan dasar setiap individu penduduk.

Kewenangan ini pada dasarnya dikemukakan dalam pemikiran UU No. 17/2011 bahwa wawasan negara diperlukan

dalam upaya penemuan dan peringatan dini terhadap setiap bahaya yang rumit dan memiliki jangkauan yang luas, mengingat kemajuan dalam iklim esensial. Pandemi Covid-19 adalah ilustrasi nyata dari bahaya yang rumit yang umumnya mempengaruhi berbagai bidang kehidupan, sehingga harus disikapi dengan pendekatan keselamatan publik, terutama melalui struktur keamanan manusia.

Terlepas dari anggapan faktor bahaya tersebut, posisi BIN juga dapat dirinci melalui tugas yang diberikan oleh UU No. 17/2011 Pasal 4, dimana melalui identifikasi dini dan peringatan dini, pengetahuan negara harus ikut serta dalam pencegahan, pemeriksaan dan penanggulangan bahaya yang mengganggu keamanan publik. Melalui ungkapan ini, bahaya pandemi Covid-19 dan penyakit menular lainnya yang mengganggu kesejahteraan umum dan berdampak luas, harus diharapkan dan disikapi untuk mewujudkan keamanan dan keberadaan negara dan negara.

DAFTAR PUSTAKA

- A'raf, A. (2015). Dinamika Keamanan Nasional. *Jurnal Keamanan Nasional*, 1(1), 27-40.
- Akhgar, B., Yates, S., & Lockley, E. (2013). Strategy Formation in a Globalized and Networked Age-A Review of the Concept and its Definition. In B. Akhgar (Ed.), *Strategic Intelligence Management*. Elsevier Inc.
- Albert, C., Baez, A., & Rutland, J. (2021). Human security as biosecurity. *Politics and the Life Sciences*, 40(1), 83-105. <https://doi.org/10.1017/pls.2021.1>
- Alfirdaus, L. K., & Yuwono, T. (2020). Pandemi Covid-19 dan Pendekatan Kebijakan Multikrisis: Sebuah Refleksi Teoritis. *JiIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 5(2), 206-216. <https://doi.org/10.14710/jiip.v5i2.8699>
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. CV Jejak.
- Ariwibowo, S. (2020). Cegah Covid-19, BIN Sosialisasikan Adaptasi Kebiasaan Baru di MAJT. <https://www.suaramerdeka.com/regional/semarang/247531-cegah-covid19-bin-sosialisasikan-adaptasi-kebiasaan-baru-di-majt>
- Armawi, A., & Suhendar, W. (2010). Mengantisipasi Ancaman Teror Nubika. *Jurnal Ketahanan Nasional*, XV(2), 1-165.
- Astuti, N. A. R. (2020, March 13). Deputi BIN Ungkap Permodelan: Puncak Corona Diperkirakan di Bulan Puasa. <https://news.detik.com/berita/d-4938262/deputibin-ungkap-permodelan-puncak-corona-diperkirakan-di-bulan-puasa>
- Atam, Widodo, P., & Risman, H. (2020). Coronavirus Disease-19 (Covid-19) Pandemic Response Through The Universal Defense: The Role Of Intelligence. *Technium Social Sciences Journal*, 8(June), 606-616.
- Bahtiar, A., & Munandar, A. I. (2020). Narrative Policy Framework (NPF) Analysis Terhadap Pelibatan Intelijen Negara dalam Penanganan Covid-19 di Indonesia. *Jurnal Keamanan Nasional*, VI(2), 184-201.
- Bertozzi, A. L., Franco, E., Mohler, G., Short, M. B., & Sledge, D. (2020). The challenges of modeling and forecasting the spread of COVID-19. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 117(29). <https://doi.org/10.1073/pnas.2006520117>
- Buzan, B. (1991). *New Patterns of Global Security in the Twenty-First Century*. *International Affairs*, 67(3).
- CIA. (1999). *Consumers Guide to Intelligence*. CIA Press. Cucinotta, D., & Vanelli, M. (2020). WHO

- declares COVID-19 a pandemic. *Acta Biomedica*, 91(1), 157–160.
- Das, S. (2008). High-level Data Fusion. Artech House, Inc.
- Dehghani, A., & Masoumi, G. (2020). Could sars-cov-2 or covid-19 be a biological weapon? *Iranian Journal of Public Health*, 49(7), 143–144.
- Deniansyah, R. (2020). Jelang Pembelajaran Tatap Muka, BIN Sambangi Sekolah di Tangsel. <https://tangerangnews.com/tangsel/read/33716/Jelang-PembelajaranTatapMuka-BIN-Sambangi-Sekolah-di-Tangsel>
- Djoyonegoro, N. (2020). Perang Global Melawan Corona: Perspektif Intelijen. Yayasan Insan Waskita Nusantara.
- Fahreza, R. (2020). Presiden Jokowi Libatkan BIN untuk Contact Tracing Pasien Positif Korona. <https://nasional.okezone.com/read/2020/03/13/337/2182894/presiden-jokowi-libatkan-bin-untuk-contact-tracing-pasien-positif-korona>
- Hartati, A. Y. (2020). Isu Covid 19 Dalam Konteks Human Security. Universitas Wahid Hasyim.
- Hidayat, F. (2019). Kapabilitas Kompi Zeni Nubika TNI AD dalam Menghadapi Ancaman Bencana Nubika. *Jurnal Manajemen Bencana*, 5(2), 57–72.
- Humas Unida. (2020). Tim Velox Pejabat BIN Sambangi UNIDA Bogor, Lakukan Sosialisasi, Edukasi dan Dekontaminasi di Lingkungan Kampus. <https://www.unida.ac.id/artikel/tim-velox-pejaten-bin-sambangi-unida-bogorlakukan-sosialisasi-edukasi-dan-dekontaminasi-di-lingkungan-kampus.html>
- Hyndman, R. J., & Athanasopoulos, G. (2018). *Forecasting : Principles and Practice*.
- Otexts. Kahana, E. (2020). Intelligence Against COVID-19: Israeli Case Study. *International Journal of Intelligence and CounterIntelligence*, 0(0), 1–8.
- Kementerian Kesehatan RI. (2018). Ancaman Keamanan Kesehatan Global. <https://www.kemkes.go.id/article/view/18110500007/bersama-hadapi-ancamankeamanan-kesehatan-global.html>
- Kent, S. (1949). *Strategic Intelligence for American Foreign Policy*. Princeton University Press.
- Kirkpatrick, L. B. (1997). *Encyclopedia of US Foreign Relations*. Oxford University Press.
- Kontras. (2020). Hentikan Pelibatan TNI dalam Penanganan Pandemi. <https://kontras.org/2020/09/14/hentikan-pelibatan-tni-dalam-penangananpandemi/>
- Krasner, S. D. (1978). *Defending The National Interest*. Princeton University Press.
- Kuncoro, W. (2019). Aparat Pengawas Intern Pemerintah: Perannya dalam Pengawasan Intelijen yang Akuntabel di Badan Intelijen Negara. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 4(2), 155. <https://doi.org/10.14710/jiip.v4i2.5629>
- Kurniawan, D. (2020). BIN: 186 Orang Reaktif Covid-19 pada Rapid Test di Surabaya. 1. <https://www.jawapos.com/surabaya/03/06/2020/bin-186-orang-reaktif-covid-19-pada-rapid-test-di-surabaya/>
- Laeis, Z. (2020). BIN Gelar Rapid dan Swab Test Covid-19 Secara Massal.